



DOK. TRIBUN JOGJA
MEMAPARKAN
- Penjabat Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo (kanan) dan cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo (kiri), sedang memberikan paparan terkait pengolahan sampah organik di kantor Tribun Jogja, Rabu (2/8).

Pemkot Yogya Ajak Warga Olah Sampah Organik Secara Mandiri

YOGYA, TRIBUN - Penjabat Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo, mendorong masyarakat untuk mulai aktif mengelola sampah organik rumah tangga secara mandiri. Langkah ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya untuk mengatasi permasalahan sampah pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

Hal itu disampaikan oleh Singgih Raharjo saat melaksanakan kunjungan redaksi ke Kantor Redaksi *Tribun Jogja*, Rabu (3/8). Dalam kunjungan itu hadir juga cucu Raja Keraton Yogyakarta, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo, dan Kadiskominfosan Kota Yogyakarta, Trihastono.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkot Yogya akan membagi-

kan biopori kepada masyarakat. Menurut Singgih, dalam pengelolaan sampah ini, Pemkot Yogya memiliki kendala kepemilikan lahan sehingga kesulitan untuk mengatasi persoalan di hilir.

"Solusinya menyelesaikan masalah (sampah) di hulu. Mereduksi di level yang paling kecil, sementara yang residu serahkan kepada kami," jelasnya.

Sampah organik tersebut bisa diolah menjadi kompos sehingga secara otomatis bisa mengurangi produksinya. Langkah itu harus diambil oleh pemerintah karena persoalan sampah di Kota Yogya tidak akan selesai jika tidak ditangani dari hulu. "Yang paling sulit itu mengedukasi masyarakat," imbuhnya. Pihaknya sudah mengeluarkan su-

rat edaran yang berisi aturan bagi pelaku usaha untuk mengelola sendiri. "Industri termasuk perhotelan dan rumah makan sudah diminta untuk mengolah sampah mandiri. Bisa untuk dibuat kompos atau bekerja sama dengan mitra," imbuhnya.

Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo mengungkapkan, pihaknya mendukung langkah Pemkot Yogya untuk menangani sampah di lingkup dari hulu. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Pemkot Yogya itu juga harus dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain di DIY.

"Kalau hulu tidak dipegang, sampai kapanpun akan jadi masalah," imbuhnya. (has)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005